



KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
 Nomor : /SET.DPRD/III/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA)
TAHUN 2017
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE

- Menimbang : a. Bahwa untuk menghasilkan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang berkualitas dan memenuhi kaidah sesuai standar yang telah ditetapkan, maka perlu di bentuk tim penyusun dokumen RENJA yang integral;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 Pada Sekretariat DPRD Kab.Bone dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kab.Bone.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 kemudian dipertegas lagi dengan terbitnya Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan Keseluruhan Kegiatan yang meliputi Perencanaan Pelaksanaan Pelaporan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, menyatakan bahwa salah satu Asas Umum Penyelenggaraan adalah Asas Akuntabilitas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beberapa kali dirubah, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengelolaan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 08; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Bupati Bone Nomor Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretaris, Kepala Bagian dan Kepala Sub.Bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bone;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 Pada Sekretariat DPRD Kab.Bone dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kab.Bone;
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 bertugas menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 sesuai Aturan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Bone;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Watampone
Pada Tanggal : 1 Maret 2017

SEKRETARIS DPRD KAB.BONE

Drs.H.MUHAMMAD RIDWAN,M.Si
PANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 1965050808 199303 1 010

Tembusan kepada Yth :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Bupati Bone | di Watampone |
| 2. Ketua DPRD Kab.Bone sebagai Laporan | di Watampone |
| 3. Peringgal. | |

Lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Kab.Bone

Nomor : /SET.DPRD/III/2017
 Tanggal : 1 Maret 2017
 Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 Pada Sekretariat DPRD Kab.Bone dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kab.Bone.

**TIM PENYUSUN
 RENCANA KERJA (RENJA)
 TAHUN 2018 PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE**

Pembina : Drs.H.MUHAMMAD RIDWAN,M.Si (Sekteraris DPRD Kab.Bone)
 Ketua : A.NURSYAMSU,SE (Kabag Keuangan DPRD Kab.Bone)
 ANGGOTA : 1. Drs.AKBAR,M.Si (Kabag Perundang-Undangan DPRD Kab.Bone)
 2. MAHIRUDDIN,SE (Kasubag Perencanaan & Anggaran DPRD Kab.Bone)
 3. NURLINDA,SE.M.Si (Kasubag Aspirasi DPRD Kab.Bone)

Ditetapkan di : Watampone
 Pada Tanggal : 1 Maret 2017

SEKRETARIS DPRD KAB.BONE

Drs.H.MUHAMMAD RIDWAN,M.SI
PANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19650508 199303 1 010

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Atas Rahmat dan Hidayah-Nya, kami telah menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2018.

Tujuan Rencana Kerja ini dibuat sebagai arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2018 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone ini secara umum belum mampu memberikan atau menyajikan bentuk yang terbaik, namun kami telah berupaya semaksimal mungkin menyusun laporan ini sehingga dapat memberikan rencana kegiatan Tahun 2018 Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna seperti yang diharapkan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan masukan dari segenap pihak yang berkompeten demi perbaikan dan penyempurnaan rencana kerja ini.

Watampone, 1 Maret 2017

SEKRETARIS DPRD KAB.BONE

Drs.H.MUHAMMAD RIDWAN,M.SI
PANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19650508 199303 1 010

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN SEKRETARIAT DPRD KAB.BONEi

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. LATAR BELAKANG..... 1

 B. LANDASAN HUKUM..... 1

 C. TUJUAN DAN SASARAN..... 3

 D. SISTEMATIKA PENULISAN..... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU..... 5

 A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD..... 5

 B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN.....12

 C. ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD... 17

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... 20

 A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL..... 20

 B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD..... 22

 C. PROGRAM DAN KEGIATAN..... 25

BAB IV PENUTUP..... 27

LAMPIRAN..... 43

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2018, mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2013-2018, Skala Prioritas, Visi, Misi dan diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi dari Kantor Pengelola Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Pendek untuk satu Tahun Anggaran yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2018.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja SKPD, yang selanjutnya disebut RENJA SKPD, disusun oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bone berdasarkan RENSTRA yang telah disusun sesuai dengan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dalam memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi dan hasil yang ingin di capai selama satu tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi.

Rencana Kerja tahun 2018 berisi sasaran, arah kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam rangka menghadapi dan menjawab isu strategi melalui pelaksanaan program dan kegiatannya selama satu tahun yakni terhitung mulai 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Masing-masing kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan rencana tingkat capaian atau target sesuai dengan kebijakan yang ditempuh Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam melaksanakan program kegiatannya.

B. LANDASAN HUKUM

Dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2018, Landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beberapa kali dirubah, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengelolaan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bone;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012 -2032;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor..... Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2013-2018;
18. Peraturan DPRD Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peraturan DPRD Kabupaten Bone tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bone;
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 36 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya rencana kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2018 yaitu :

- 1). Untuk memberikan Informasi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategis dan prioritas dari Sekretariat DPRD Kabupaten Bone;
- 2). Sebagai tolak ukur kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2018;
- 3). Untuk memberikan Informasi tentang Indikator kinerja kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kegiatan berikutnya.

Tujuan disusunnya Renja Tahun 2018 sebagai berikut :

- 1) Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur;
- 2) Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik Laporan Realisasi Anggaran maupun LAKIP dan masukan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Bone;
- 3) Untuk menjadi bahan pertanggung jawaban yang transparan baik terhadap Pemerintah maupun Masyarakat;
- 4) Terciptanya Laporan Pemanfaatan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2018.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I	PENDAHULUAN.	
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Landasan Hukum.....	1
	C. Maksud dan Tujuan.....	3
	D. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KAB.BONE TAHUN LALU.	
	A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun lalu dan Capaian	5
	B. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.....	12
	C. Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.....	17
BAB III	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	
	A. Telaahan terhadap kebijakan daerah.....	20
	B. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.....	22
	C. Program dan Kegiatan.....	25
BAB IV	PENUTUP.....	27
	LAMPIRAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KAB.BONE TH.2018.....	43

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE

Keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bone pada tahun 2016 yang ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Bone. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten Bone mempunyai tugas dan fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Mengacu pada RENSTRA tahun 2013 – 2018, yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan yaitu tahun 2016, maka dari rencana Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2016 dapat dievaluasi sebagai berikut :

Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2016 mengelola anggaran sebesar Rp. 24.931.212.100,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.731.212.100,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.22.200.000.000,-

I. PENDAPATAN

SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Bone sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya tidak memiliki Pendapatan.

II. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja tidak langsung terdiri dari gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja untuk tahun 2016 pada anggaran pokok/sebelum perubahan anggaran sebesar Rp.2.660.004.600,- dan setelah perubahan anggaran tetap Rp. 2.731.212.100,- dan Dana yang terealisasi sebesar Rp.2.602.773.630,- atau 95,30%

III. BELANJA LANGSUNG

Sekretariat DPRD Kabupaten Bone pada Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah anggaran pokok sebesar Rp. 17.400.000.000,- setelah perubahan jumlah anggaran sebesar Rp. 22.200.000.000,- dan Dana yang terealisasi sebesar Rp.21.581.939.607,- atau 97,22%

Sekretariat DPRD Kabupaten Bone pada Tahun Anggaran 2016 memiliki 4 (empat) Program dengan 22 (dua puluh dua) kegiatan. Program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sampai dengan akhir Desember 2016.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 serta keberhasilan yang telah dicapai melalui indikator kebersihan dan pencapaian target kinerja sebagai berikut :

➤ **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Terdiri dari 6 (enam) kegiatan dengan Anggaran Rp.4.304.342.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.210.462.281,- atau 97,82% dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Kegiatan ini untuk tahun anggaran 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp.19.200.000,- dan teralisasi sebesar Rp.17.985.000,- atau 93,68%

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan ini untuk tahun anggaran 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp.250.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp.215.934.581,- atau 86,38 %.

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

Kegiatan ini untuk tahun anggaran 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp.738.650.000,- dan teralisasi sebesar Rp.691.005.000,- atau 93,55%.

4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Kegiatan ini untuk tahun anggaran 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp.650.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp.649.725.000,- atau 99,96%

5. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah.

Kegiatan ini untuk tahun anggaran 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.545.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp.1.535.511.200,- atau 99,39%

6. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan ini untuk tahun anggaran 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.101.492.000,- dan teralisasi sebesar Rp.1.100.301.500,- atau 99,90%

➤ **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan dengan Anggaran Rp.2.808.500.000,- terealisasi sebesar Rp.2.515.376.340,- atau 89,57% dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas.

Kegiatan ini untuk tahun anggaran 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp.77.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp.77.000.000,- atau 100 %.

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

Kegiatan ini untuk tahun anggaran 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp.37.500.000,- dan teralisasi sebesar Rp.37.500.000,- atau 100 %.

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan.

Kegiatan ini untuk tahun anggaran 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp.400.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp.156.644.500,- atau 39,17 %.

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

Kegiatan ini untuk tahun anggaran 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp.340.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp.334.589.000,- atau 98,41 %.

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

Kegiatan ini untuk tahun anggaran 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp.837.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp.835.869.840,- atau 99,87 %.

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

Kegiatan ini untuk tahun anggaran 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp.122.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp.121.863.000,- atau 99,89 %.

7. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor.

Kegiatan ini untuk tahun anggaran 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp.995.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp.951.910.000,- atau 95,67 %.

➤ **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dengan Anggaran Rp.32.133.000,- terealisasi sebesar Rp.32.096.500,- atau 99,89% dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan ini untuk tahun anggaran 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp.32.133.000,- dan teralisasi sebesar Rp. Rp.32.096.500,- atau 99,89%

➤ **Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.**

Terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan dengan Anggaran Rp.15.055.025.000,- terealisasi sebesar Rp.14.824.004.486,- atau 98,47% dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Kegiatan ini untuk tahun anggaran 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp.230.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.230.000.000,- atau 100%.

2. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

Kegiatan ini untuk tahun anggaran 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp.145.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp.142.333.000,- atau 98,17%.

3. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan.

Kegiatan ini untuk tahun anggaran 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp.115.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp.114.750.000,- atau 99,79 %.

4. Rapat-Rapat Paripurna.

Kegiatan ini untuk tahun anggaran 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp.535.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp.534.450.000,- atau 99,90%.

5. Reses

Kegiatan ini untuk tahun anggaran 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.761.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp.1.760.325.000,- atau 99,97 %.

6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

Kegiatan ini untuk tahun anggaran 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.125.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp.9.960.136.986,- atau 98,38 %.

7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

Kegiatan ini untuk tahun anggaran 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.059.025.000,- dan teralisasi sebesar Rp.1.998.379.500,- atau 97,06 %.

8. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

Kegiatan ini untuk tahun anggaran 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp.85.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp.83.630.000,- atau 98,39 %.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2016 ditentukan dari hasil pelaksanaan program kegiatan yang disesuaikan dengan Renja dan APBD. Adapun realisasi anggaran per 31 Desember 2016 sebagaimana table berikut ini :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.731.212.100,-	2.602.773.630,-	95,30%
	Belanja Pegawai	2.731.212.100,-	2.602.773.630,-	95,30%
B	BELANJA LANGSUNG	22.200.000.000,-	21.581.939.607,-	97,22%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.304.342.000	4.210.462.281	97,82%
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.200.000	17.985.000	93,68%
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000	215.934.581	86,38%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	738.650.000	691.005.000	93,55%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	650.000.000	649.725.000	99,96%
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1.545.000.000	1.535.511.200	99,39%
	Pelaksanaan Administrasi	1.101.492.000	1.100.301.500	99,90%

	Perkantoran			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.808.500.000	2.515.376.340	89,57%
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	77.000.000	77.000.000	100%
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	37.500.000	37.500.000	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	400.000.000	156.644.500	39,17%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	340.000.000	334.589.000	98,41%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	837.000.000	835.869.840	99,87%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	122.000.000	121.863.000	99,89%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	995.000.000	951.910.000	95,67%
3	Program Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	.32.133.000	32.096.500	99,89%
	1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	.32.133.000	32.096.500	99,89%
4	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	15.055.025.000	14.824.004.486	98,47%
	1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	230.000.000	230.000.000	100%
	2) Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama	145.000.000	142.333.000	98,17%
	3) Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	115.000.000	114.750.000	99,79%
	4) Rapat-Rapat Paripurna	535.000.000	534.450.000	99,90%
	5) Reses	1.761.000.000	1.760.325.000	99,97%
	6) Kunjungan Kerja	10.125.000.000	9.960.136.986	98,38%

	Pimpinan dan Anggota DPRD			
	7) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	2.059.025.000	1.998.379.500	97,06%
	8) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	85.000.000	83.630.000	98,39%
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG	24.931.212.100	24.184.713.237	97,01%

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Untuk mengukur Kinerja, maka indikator yang digunakan adalah indikator kinerja kegiatan sasaran strategi dan indikator kinerja kegiatan strategi tahun 2016. Indikator kinerja sasaran strategi adalah indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen kerja. Indikator kinerja kegiatan terdiri dari Indikator Input, Output dan Outcome untuk setiap kegiatan. Selanjutnya program di tiap-tiap indikator kinerja kegiatan ditetapkan satuan, rencana dan realisasinya, dari perbandingan antara rencana dan realisasi tersebut dihasilkan capaian kinerja. Dalam rangka pencapaian sasaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2016 ini mempunyai 4 (Empat) Program dan 22 (dua puluh dua kegiatan). Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 serta keberhasilan yang telah dicapai melalui indikator kebersihan dan pencapaian target kinerja sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar Sekretariat DPRD agar kegiatan pelayanan publik berjalan dengan baik dan lancar pada tahun 2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bone memperoleh alokasi dana untuk Program pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp.4.304.342.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.210.462.281,- atau 97,82%. Alokasi dana tersebut digunakan untuk kegiatan antara lain :

- 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik
- 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.

Indikator kinerja, target dan realisasi Program pelayanan administrasi perkantoran dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	93,68
Peresentase Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	86,38
Jumlah Laporan Keuangan Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	93,55
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	38 Media x 12 Bln	38 Media x 12 Bln	99,96
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	99,39
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	99,90

Keenam indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan pada tahun 2016 telah berhasil dicapai rata-rata 100%. Adapun Pencapaian indikator kinerja program/kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada formulir PK.

Keberhasilan tersebut didorong oleh pelaksanaan 6 (enam) indikator sasaran seperti fungsi dan tugas pokok dalam suatu lembaga daerah lebih jelas dan terinci. Pelaksanaan program pada sasaran strategis 1 (satu) telah dialokasikan sejumlah dana input telah mencapai 100% atau menunjukkan indikator **sangat memuaskan**.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja Program/Kegiatan Renja tahun 2016.

Alokasi dana untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp. 2.808.500.000,- realisasi sebesar 2.515.376.340,- atau 89,57% . Alokasi dana tersebut digunakan untuk kegiatan antara lain :

- 1. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
- 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
- 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- 7. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

Indikator kinerja, target dan realisasi Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	1 Paket	1 Paket	100
Peresentase Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket	100
Peresentase Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan	1 Paket	1 Paket	39,17
Peresentase Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	98,41
Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	18 Unit	18 Unit	99,87
Peresentase Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	99,89
Peresentase Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	95,67

Indikator Kinerja Sasaran 2 terdiri dari 7 (tujuh) Indikator Kerja yang telah ditetapkan Tahun 2016 dengan tingkat realisasi yaitu sebanyak 7 Indikator mencapai 100% dan 1 (satu).

Keberhasilan tersebut didorong oleh Pelaksanaan 7 (tujuh) Indikator Sasaran seperti Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah, Peningkatan Pengelolaan/Pengadaan barang dan Pemeliharaan aset sehingga dapat meningkatkan profesionalisme di bidang tugasnya

Dengan demikian pencapaian indikator kinerja dalam sasaran ini **Baik Sekali** karena income pencapaian output telah memberikan kontribusi peningkatan kualitas pelayanan.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini diarahkan untuk pemenuhan pelayanan publik berjalan dengan baik dan lancar. Alokasi dana ini sebesar Rp.32.133.000,- realisasi sebesar Rp.32.096.500,- atau 99,89 % digunakan untuk kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD.

Indikator kinerja, target dan realisasi program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Peresentase Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1 Thn	1 Tahun	99,89

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kinerja untuk peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sudah terlaksana dengan baik. Dengan meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dapat meningkatkan pelayanan yang ada pada Sekretariat DPRD serta turut mendorong penguatan dalam hal pelaksanaan laporan realisasi anggaran bagian,neraca atas laporan keuangan meningkat yang dilaksanakan melalui target kinerja sesuai dengan tolak ukur renstra.

4. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintahan Rakyat Daerah

Keberhasilan pencapaian Program ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja Program/Kegiatan Renja tahun 2016.

Alokasi dana untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp. 15.055.025.000,- realisasi sebesar 14.824.004.486,- atau 98,47% . Alokasi dana tersebut digunakan untuk kegiatan antara lain :

- 1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- 2. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama.
- 3. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan lain yang difasilitasi Sekretariat.
- 4. Rapat-Rapat Paripurna
- 5. Reses
- 6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
- 7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
- 8. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Perda	10 Perda	100
2. Peresentase Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama.	7 Dokumen	7 Dokumen	100
3. Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan lain yang difasilitasi Sekretariat.	44	44	100
4. Jumlah Rapat-Rapat Paripurna	20	20	100
5. Jumlah Kegiatan Reses	35	35	100
6. Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	15	15	100
7.Jumlah Bimbingan Teknis berkaitan tugas dan fungsi DPRD (kali)	10	10	100
8.Jumlah Perda yang disosialisasi (Perda)	3 Perda	3 Perda	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Keberhasilan indikator kinerja sasaran yang telah dicapai pada tahun 2016 telah berhasil dicapai rata-rata 99% dan indikator kinerja program/kegiatan secara detail dapat dilihat pada PKk terlampir

Keberhasilan sasaran tersebut didorong oleh kedelapan indikator kinerja sasaran yaitu prosentase jumlah Perda/produk hukum yang dihasilkan bertambah ,tersalurkannya aspirasi masyarakat,terlaksananya bintek dan kunjungan ke daerah,dan pusat

Secara umum indikator kinerja menunjukkan indikasi yang **sangat memuaskan**Terlihat khususnya kinerja sasaran memperlancar tugas sosialisasi produk hukum dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan memberikan kekuatan hukum kepada masyarakat.

C. ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

1. Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian target kinerja Tahun 2016, Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dengan pencapaian kinerja keuangan sebagai berikut :

- Belanja Langsung 97,22 % (sangat baik)
- Belanja Tidak Langsung 95,30 % (sangat baik)

Tingkat kinerja secara umum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bone sudah berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tetapi masih banyak yang harus di benahi/diperbaiki sesuai dengan perkembangan dan tuntutan dari masyarakat dengan pelayanan yang optimal.

2. Permasalahan dan hambatan

Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsinya untuk mewujudkan visi dan misi Yang telah ditetapkan telah dijumpai beberapa permasalahan dan hambatan dalam melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone yaitu :

- a. Belum optimalnya penyimpanan, pengelolaan data, dan pelayanan administrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone;
- b. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone;
- c. Terbatasnya tenaga terampil dan profesional baik dari kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan bidang tugasnya di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone;
- d. Belum optimalnya kapasitas Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi, meliputi fungsi Legislasi, Penganggaran, dan Pengawasan;
- e. Ranperda Inisiatif DPRD masih sangat minim karena komitmen DPRD yang masih kurang dalam penyusunan dan pembahasan Perda Inisiatif;
- f. Banyaknya kasus panduan masyarakat yang masuk namun tidak diimbangi dengan kemampuan dan jumlah sumber daya manusia yang ada, sehingga banyak kasus yang belum dapat segera diselesaikan.

3. Tantangan dan Peluang

a. Tantangan

Tantangan atau ancaman datang dari luar Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilannya.

Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Agenda reformasi terus bergulir dan salah satu dampaknya adalah tuntutan aspirasi masyarakat semakin kritis dan beragam yang mengarah

pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah semakin berkurang. Ini semua merupakan tantangan tersendiri bagi aparatur pemerintah, khususnya para Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat;

- 2) Krisis ekonomi yang berkepanjangan merupakan salah satu dampak negatif dari krisis multi dimensional yang melanda negara kita yang berakibat pada menurunnya kemampuan pembiayaan pemerintah. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone;
- 3) Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan dari penyempurnaan/revisi Perundang-Undangan yang telah dilakukan, seperti Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri, khususnya yang menyangkut pelayanan Administrasi Pemerintahan.

b. Peluang

Beberapa peluang yang akan mendukung kelancaran Pelaksanaan Tupoksi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone dalam mencapai Visi dan Misi diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone;
- 2) Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang terampil sesuai dengan bidangnya tugasnya untuk meningkatkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi;
- 3) Tuntutan permintaan peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan dari DPRD, merupakan peluang bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengembangkan kemampuannya agar dapat memenuhi permintaan tersebut;
- 4) Kondisi Keamanan di daerah yang relatif stabil bila dibandingkan dengan daerah lain, akan memberikan pengaruh bagi berkembangnya pelaksanaan administrasi pemerintahan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. TELAAHAN TERHADAP STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone dalam RPJMD untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Bone Tahun 2013 – 2018 yaitu : “Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera”, ada 3 (tiga) point yang menjadi hal utama yaitu yang pertama Sehat yang Kedua Cerdas dan yang Ketiga Sejahtera.

Sehat mengandung arti bahwa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan memperluas aksesibilitas pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas, **Cerdas** mengandung arti terciptanya pemerataan pendidikan bagi laki-laki dan perempuan, berkebutuhan khusus, difable dan marginal yang berkualitas untuk mewujudkan kualitas manusia mandiri berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal, **Sejahtera** mengandung arti bahwa masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup berkelanjutan dalam aspek ekonomi, politik, sosial budaya, lingkungan hidup, didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah mencenangkan Visi dan Misi serta program strategi yang akan dilakukan selama masa pemerintahan 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

a. Visi Jangka Menengah Kabupaten Bone tahun 2013-2018 yaitu :

“Masyarakat Bone Yang Cerdas, Sehat dan Sejahtera”

b. Dalam rangka mencapai Visi Jangka Menengah Kabupaten Bone tahun 2013-2018, Misi yang ditempuh sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, adil dan merata.

Misi 2 : Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri.

Misi 3 : Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan.

Misi 4 : Meningkatkan pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan.

Misi 5 : Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Misi 6 : Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Bone yang merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Bone memiliki peran yang strategis untuk mewujudkan Visi tersebut, Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan di DPRD memiliki tugas pokok dan fungsi memfasilitasi kegiatan DPRD untuk melahirkan produk-produk hukum yang berkualitas yang berhubungan dengan Visi Sehat, Cerdas dan Sejahtera.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dan mengarahkan pada Visi dan Misi. Strategi merupakan Rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional. Strategi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan Visi-Misi-Tujuan-Sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi yang ditetapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone untuk tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dengan mengikuti dalam diklat/bintek/sosialisasi dan lain-lain.
2. Meningkatkan penyediaan perlengkapan administrasi perkantoran.
3. Mengoptimalkan sistem pendataan, pelaporan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD
4. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur dan penyediaan perlengkapan sesuai kebutuhan
5. Peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan Rapat Alat Kelengkapan DPRD dan Rapat Paripurna.
6. Meningkatkan Kapasitas, Kunjungan Kerja DPRD berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, meliputi legislasi, penganggaran dan pengawasan..
7. Meningkatkan penyerapan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat melalui dengar pendapat, dan reses DPRD

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan ketrpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone. Kebijakan dapat berupa regulative seperti aturan, system dan prosedur maupun alokatif seperti sumber daya, dana, dan waktu. Kebijakan diharapkan dapat :

1. Memberikan petunjuk prinsip-prinsip, rambu-rambu dan signal-signal penting dalam menyusun program dan kegiatan;
2. Memberikan informasi mengenai bagaimana strategi akan dilaksanakan;
3. Memberikan keyakinan bagi pelaksanaan (baik aparatur pemerintah maupun masyarakat;
4. Untuk kelancaran dan keterpaduan upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Kebijakan yang ditetapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone untuk tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD.
2. Peningkatan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD dan DPRD
4. Peningkatan penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
5. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam pembahasan Perda.
6. Peningkatan Pelaksanaan Reses Anggota DPRD dalam penyerapan aspirasi masyarakat.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam jangka waktu tahunan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Keselarasan antara visi, Misi, Tujuan, Sasaran, strategi dan kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone untuk tahun 2013-2018 terlihat pada tabel berikut:

Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Sekretariat DPRD			
Visi : "Terwujudnya Tertib Administrasi dan Pelayanan yang Prima dalam Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone"			
Misi 1: Mewujudkan peningkatan pelayanan administrasi yang prima dalam menunjang pelayanan kepada DPRD			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menciptakan administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib, bersih dan akuntabel.	1. Meningkatkan perencanaan kerja dan pengelolaan keuangan secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan. 2. Meningkatkan mutu keterampilan, pengetahuan dan wawasan sumber daya aparatur.	1.Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dengan mengikuti dalam diklat/bimtek/sosialisasi dan lain-lain. 2.Meningkatkan penyediaan perlengkapan administrasi perkantoran. 3.Mengoptimalkan sistem pendataan, pelaporan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sekretariat DPRD.
Misi 2 Mewujudkan peningkatan penyediaan sarana prasarana dan peralatan kerja dalam menunjang pelayanan kepada DPRD			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan peralatan kerja agar dapat berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada DPRD.	Terciptanya efektifitas persidangan dan penyelenggaraan kegiatan DPRD	Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur dan penyediaan perlengkapan sesuai kebutuhan.	Peningkatan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor serta sarana dan prasarana sekretariat dan DPRD.

Misi 3. Mewujudkan kelembagaan DPRD yang kuat, aspiratif, responsif dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyiapan bahan rapat dan risalah, penyelenggaraan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas serta pengelolaan administrasi dan kegiatan komisi kepanitiaan dan fraksi.	<div>1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyiapan bahan rapat dan risalah, penyelenggaraan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas DPRD.</div> <div>2. Tertibnya pengelolaan administrasi dan kegiatan komisi kepanitiaan dan fraksi.</div>	Peningkatan pelayanan sekretariat DPRD dalam pelaksanaan Rapat alat kelengkapan DPRD dan rapat paripurna.	Peningkatan penyelenggaraa n rapat-rapat DPRD.
Menciptakan produk hukum yang berkualitas dan hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta terdokumenta sikannya kegiatan DPRD dengan baik.	Terciptanya produk hukum berkualitas dan selaras dengan peraturan perundang-undangan serta sesuai kebutuhan masyarakat.	<div>1. Meningkatkan kapasitas, kunjungan kerjaDPRD berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, meliputi legislasi, penganggaran dan pengawasan.</div> <div>2. Meningkatkan penyerapan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat melalui dengar pendapat, dan reses DPRD.</div>	<div>1. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam pembahasan Perda.</div> <div>2. Peningkatan pelaksanaan reses Anggota DPRD dalam penyerapan aspirasi masyarakat.</div>

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Adapun program dan kegiatan tahun 2018 Sekretariat DPRD Kabupaten Bone merencanakan 4 (Empat) Program yaitu :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,** dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
 - e) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
 - f) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,** dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengadaan Kendaraan Dinas/perasional
 - b) Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
 - c) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - d) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - e) Pengadaan Mebeleur
 - f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
 - g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - h) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - i) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - j) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
 - k) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
- 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,** dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintahan Rakyat Daerah,** dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

- b) Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
- c) Rapat-Rapat Alat Kelengkapan
- d) Rapat-Rapat Paripurna
- e) Kegiatan Reses
- f) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
- g) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
- h) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintahan Rakyat Daerah,
dengan kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari 5 (Lima) program tersebut diimplementasikan melalui 27 (Dua Puluh Tujuh) kegiatan. Agar program dan kegiatan yang telah ditentukan dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran maka perlu ditetapkan indikator kinerja dan sasaran yang ingin dicapai dan disertai dengan dana indikatif yang dibutuhkan. Indikator kinerja dan kelompok sasaran serta dana indikatif program dan kegiatan tahun 2018 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone (sebagaimana terlampir).

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone sebagai rencana jangka pendek dalam rangka mewujudkan Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018, Visi dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone, telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang memuaskan atas capaian kinerja sasaran– sasaran strategisnya. Indikator kinerja sasaran yang mengindikasikan kepada 5(Lima) sasaran strategis sebagian besar telah dapat direalisasi 100% bahkan ada yang mencapai diatas 100%. Hal ini menunjukkan adanya komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Bone untuk mewujudkan visi sekaligus misinya pada tahun mendatang.

Seluruh capaian kinerja tersebut, baik yang belum mencapai 100% telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis atas capaian kinerja 2017 kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan di masa akan datang yaitu sebagai berikut :

1. Upaya lebih mendorong pengembangan kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan peluang.
2. Penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan lebih akurat, cermat dan tetap konsisten pada aflikasi visi, misi, Renstra, kebijakan, program yang telah disepakati sebagai komitmen yang utuh, sehingga indikator kinerja yang ditetapkan lebih dahulu disepakati secara bersama–sama oleh stakeholders, pelaksanaan pembangunan dapat dievaluasi dan dibarengi dengan upaya pengawasan yang lebih optimal.
3. Lebih meningkatnya disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundang–undangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.

Akhirnya, kami beserta segenap aparat Sekretariat DPRD Kabupaten Bone mengharapkan agar Rencana Kerja (RENJA) tahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiban Akuntabilitas kepada stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Watampone, 1 Maret 2017

SEKRETARIS DEWAN,

DRS. H.MUHAMMAD RIDWAN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 196505508 199303 1 010

LAMPIRAN RENJA

RENCANA KERJA TAHUN 2017
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. BONE

N O	PROGRAM/KEGIATAN			VOLUME	LOKASI		APBD	Total
					KECAMATAN	DESA/KEL		
1	120.12004.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					4.507.829.500	4.507.829.500
		120.12004.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	T.R.Barat	Kel.Macanang	19.200.000	19.200.000
		120.12004.01.02	Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	T.R.Barat	Kel.Macanang	235.000.000	235.000.000
		120.12004.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	T.R.Barat	Kel.Macanang	844.100.000	844.100.000
		120.12004.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	T.R.Barat	Kel.Macanang	650.000.000	650.000.000
		120.12004.01.23	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	1 Tahun	T.R.Barat	Kel.Macanang	1.600.000.000	1.600.000.000
		120.12004.01.24	Pelaksanaan administrasi Perkantoran	1 Tahun	T.R.Barat	Kel.Macanang	1.159.529.500	1.159.529.500
2	120.12004.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					2.765.700.000	2.765.700.000
		120.12004.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/perasional	1 Tahun	T.R.Barat	Kel.Macanang	100.000.000	100.000.000
		120.12004.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	T.R.Barat	Kel.Macanang	413.000.000	413.000.000
		120.12004.02.08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	1 Tahun	T.R.Barat	Kel.Macanang	168.000.000	168.000.000
		120.12004.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	T.R.Barat	Kel.Macanang	172.200.000	172.200.000
		120.12004.02.10	Pengadaan Mebeleur	1 Tahun	T.R.Barat	Kel.Macanang	10.000.000	10.000.000

		120.12004.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	1 Tahun	T.R.Barat	Kel.Macanang	200.000.000	200.000.000
		120.12004.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	T.R.Barat	Kel.Macanang	275.000.000	275.000.000
		120.12004.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Opereasional	1 Tahun	T.R.Barat	Kel.Macanang	809.800.000	809.800.000
		120.12004.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	T.R.Barat	Kel.Macanang	155.000.000	155.000.000
		120.12004.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	1 Tahun	T.R.Barat	Kel.Macanang	65.000.000	65.000.000
		120.12004.02.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	1 Tahun	T.R.Barat	Kel.Macanang	199.000.000	199.700.000
		120.12004.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	1 Tahun	T.R.Barat	Kel.Macanang	199.700.000	198.000.000
3	120.12004.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					39.095.500	39.095.500
		120.12004.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	T.R.Barat	Kel.Macanang	39.095.500	39.095.500
4	120.12004.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah					13.058.175.000	13.058.175.000
		120.12004.15.01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Tahun	T.R.Barat	Kel.Macanang	211.400.000	211.400.000
		120.12004.15.02	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	1 Tahun	T.R.Barat	Kel.Macanang	113.900.000	113.900.000
		120.12004.15.03	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	1 Tahun	T.R.Barat	Kel.Macanang	86.400.000	86.400.000
		120.12004.15.04	Rapat-Rapat Paripurna	1 Tahun	T.R.Barat	Kel.Macanang	596.400.000	596.400.000
		120.12004.15.05	Kegiatan Reses	1 Tahun	T.R.Barat	Kel.Macanang	1.901.850.000	1.901.850.000
		120.12004.15.06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	1 Tahun	T.R.Barat	Kel.Macanang	8.325.000.000	8.325.000.000

		120.12004.15.07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Tahun	T.R.Barat	Kel.Macanang	1.773.225.000	1.773.225.000
		120.12004.15.08	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	T.R.Barat	Kel.Macanang	50.000.000	50.000.000
5.	120.12004.26		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.	1 Tahun	T.R.Barat	Kel.Macanang	627.200.000	627.200.000
			Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	T.R.Barat	Kel.Macanang	627.200.000	627.200.000
Grand Total							20.998.000.000	20.998.000.000

Watampone, 1 Maret 2017

SEKRETARIS DPRD KAB.BONE,

Drs. H.MUHAMMAD RIDWAN, M.Si

PANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA

NIP: 19650508 199303 1 010

**DAFTAR USULAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KAB.BONE TAHUN 2018
(BAHAN FORUM SKPD TAHUN 2017)**

N O	PERMENDAGRI					JUMLAH DANA	SUMBER DANA	PROGRAM DALAM RENSTRA	PROGR AM DALAM RPJMD	K E T
	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN					
1 .	120.12004.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	120.12004.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 4.507.829.500.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.01.01	- Penyediaan jasa surat-menyrat	Rp. 19.200.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.01.02	- penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp. 235.000.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.01.07	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp. 844.100.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.01.15	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 650.000.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.01.23	- Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Rp. 1.600.000.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.01.24	- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.159.529.500.00	APBD	Ada	Ada	
2 .	120.12004.02	Program Peningkatan Sarana	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	120.12004.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 2.765.700.000.00	APBD	Ada	Ada	

		dan Prasarana Aparatur		120.12004.02.05	- Pengadaan Kendaraan Dinas/perasional	Rp.	100.000.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.02.07	- Pengadaan Perlengkapan Rumah Gedung Kantor	Rp.	413.000.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.02.08	- Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Rp.	168.000.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.02.09	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp.	172.200.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.02.10	- Pengadaan Mebeleur	Rp.	10.000.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.02.22	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp.	275.000.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.02.24	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp.	809.800.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.02.26	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp.	155.000.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.02.29	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Rp.	65.000.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.02.40	- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Rp.	199.700.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.02.45	- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rp.	198.000.000.00	APBD	Ada	Ada	

3	120.12004.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	120.12004.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	39.095.500.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.06.01		Rp	39.095.500.00	APBD	Ada	Ada	
4	120.12004.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	120.12004.15	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp	13.058.175.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.15.01		Rp	211.400.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.15.02		Rp	113.900.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.15.03		Rp	86.400.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.15.04		Rp	596.400.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.15.05		Rp	1.901.850.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.15.06		Rp	8.325.000.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.15.07		Rp	1.773.225.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.15.08		Rp	50.000.000.00	APBD	Ada	Ada	
5	120.12004.26	Penataan Peraturan	Persentase Jumlah	120.12004.02	Penyusunan Rencana Kerja	Rp	627.200.000.00	APBD	Ada	Ada	

		Perundang-Undangan	Rapat Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lain yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD sesuai Usulan Komisi %)		Rancangan Peraturan Perundang-Undangan					
					TOTAL	Rp. 20.998.000.000,00				

Watampone, 1 Maret 2017
SEKRETARIS DPRD KAB.BONE,

Drs. H.MUHAMMAD RIDWAN, M.Si
PANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP: 196505508 199303 1 010

**DAFTAR USULAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KAB.BONE TAHUN 2015
(BAHAN FORUM SKPD TAHUN 2014)**

N O	PERMENDAGRI					JUMLAH DANA	Sumber Dana	PROGR AM DLM RENT RA	PROGR AM DLM RPJMD	KE T.
	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN					
1	120.12004.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	120.12004.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 3.808.350.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.01.01	- Penyediaan jasa surat-menyurat	Rp. 19.200.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.01.02	- penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp. 250.000.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.01.07	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp. 768.650.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.01.15	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 550.000.000.00	APBD	Ada	Ada	
						Rp. 1.275.000.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.01.23	- Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Rp. 945.500.000.00	APBD	Ada		
				120.12004.01.24	- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran					
				120.12004.01.24	- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Rp. 465.100.000.00				
							Ada	Ada		
2	120.12004.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	120.12004.02.03	-Pembangunan gedung kantor	Rp. 39.974.345,00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.02.05	- Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Rp.1.294.000.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.02.06	- Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Rp. 71.000.000,00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.02.07	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp. 40.000.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.02.08	-Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Rp. 80.000.000.00	APBD	Ada	Ada	

				120.12004.02.09	- Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp. 65.000.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.02.10	- pengadaan mebeleur	Rp. 160.000.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.02.20	-Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Rp. 150.000.000,00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.02.22	-Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp. 233.778.000,00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.02.24	-Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 464.644.000,00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.02.26	-Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp. 155.000.000,00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.02.29	-Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Rp. 600.000.000,00	APBD	Ada	Ada	

3	120.12004.06	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan pencapaian Kinerja dan Keuangan	120.12004.06.01	- Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi Kinerja SKPD	Rp. 89.040.000.00	APBD	Ada	Ada	
4	120.12004.15	Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	120.12004.15.01	- Pembahasan Rancangan Peraturan daerah	Rp. 250.000.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.15.02	- Hearing/dialog dan koordinator dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Rp. 190.000.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.15.03	- Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Rp. 68.000.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.15.04	- Rapat-rapat Paripurna	Rp. 470.000.000.00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.15.05	- Kegiatan Reses	Rp.1.761.000.000,00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.15.06	- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp.5.176.259.000,00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.15.06	- Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp.7.643.610.000,00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.15.07	-Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Rp.3.289.988.000,00	APBD	Ada	Ada	
				120.12004.15.08	- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.	Rp. 164.000.000,00	APBD	Ada	Ada	
					TOTAL	Rp.22.952.830.845,00				

Watampone, 26 Pebruari 2014
SEKRETARIS DPRD KAB.BONE

Drs.A.RUSLAN,M.Si
PANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP: 19590723 198603 1 017

